

POLA – HUBUNGAN KERJA – JALUR – KOORDINASI – PENYELENGGARAAN – PEMERINTAHAN

2020

PERBUP NO. 68 BD. 2020. NO. 68 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang maka diperlukan keselarasan, keterpaduan, keserasian hubungan kerja pemerintahan daerah, dalam rangka diperlukan panduan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian hubungan kerjapemerintahan daerah maka diperlukan pedoman hubungan kerja dan jalur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang.</li><li>- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2009, UU Nomor. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016.</li><li>- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pola hubungan kerja dan jalur koordinasi dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li></ul>
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Desember 2020</li><li>- Terdiri atas 28 pasal</li></ul>